

BAB IV GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Daerah Penelitian

Secara geografis, Undaan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Undaan terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan tiga kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, serta Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak di sebelah timur dan barat. Undaan juga dikenal sebagai "kota seribu gapura", dengan salah satu bukti autentiknyanya adalah adanya gapura yang berdiri di setiap gang perkampungan.

Di kecamatan Undaan terdapat total 16 desa, antara lain: Glagahwaru, Kalirejo, Karangrowo, Kutuk, Lambangan, Larikrejo, Medini, Ngemplak, Sambung, Terangmas, Undaan Kidul, Undaan Lor, Undaan Tengah, Wates, Wonosoco, dan Berugenjang. Secara geografis, Undaan memiliki sumber mata air yang tidak pernah kering, bahkan saat musim kemarau, yang dikenal sebagai sendang. Sumber air ini terletak di kaki pegunungan kapur utara, tepatnya di desa Wonosoco.

Adapun batas-batas administratif kecamatan undaan, yaitu;

1. Di sebelah utara, Undaan berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Mejobo.
2. Di sebelah selatan, wilayah Undaan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.
3. Di sebelah timur, Undaan berbatasan dengan Kabupaten Pati.
4. Di sebelah barat, Undaan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Undaan adalah salah satu kecamatan di Kota Kudus, dengan jumlah penduduk sekitar 75.677 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 37.935 jiwa laki-laki dan 37.742 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk di desa-desa Undaan memiliki profesi sebagai petani, dan kecamatan ini dikenal sebagai pusat pangan di Kabupaten Kudus. Hampir 80% dari penduduk Undaan menggantungkan hidupnya pada profesi petani, karena sebagian besar lahan di wilayah ini digunakan untuk pertanian. Selain itu, ada juga warga yang tidak memiliki lahan pertanian atau sawah dan memilih bekerja sebagai buruh tani atau buruh bangunan. Karena kesadaran akan keterbatasan penghasilan, beberapa warga tanpa lahan pertanian memilih bekerja di luar negeri untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Kecamatan undaan sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan sungai namun sering dengan laju urbanisasi mejadikan lahan sungai sebagian menjadi kawasan perumahan dan lahan pertanian.

Kecamatan undaan saat ini juga masih di kelilingi sungai, yang mampu mengakibatkan banjir di setiap tahunnya pada saat musim hujan. Oleh karna itu, mengakibatkan banyak keresahan para petani yang gagal panen.

B. Deskripsi Data Penelitian

Diskripsi data-data dalam penelitian ini meliputi data keuangan daerah yaitu pendapatan asli daeah, dana perimbangan, total pendapatan daerah, totoal belanja derah, total penerimaan daerah yang terangkung dalam Anggaran Pendaptan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan perimbangan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik buruk suatu kinerja keuangan daerah yang tergambar dari realisasi anggaran pendapatan belanja daerah karena keuangan daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan kecamatan undaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan berfokus pada pencapaian prestasi kerja. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan pembangunan sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja adalah sebuah sistem perencanaan anggaran yang menggabungkan rencana kerja dengan anggaran tahunan, menciptakan hubungan yang jelas antara dana yang tersedia dan hasil yang diharapkan. Kinerja ini harus mencerminkan efektivitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penelitian yang mencakup periode APBD dari tahun 2019 hingga tahun 2022, struktur anggaran akan didasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Hal ini merupakan penyempurnaan dari struktur anggaran sebelumnya yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002.

C. Analisis Data Penelitian

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan daewrah pemerintahan kecamatan undaan tahun anggaran 2019-2022. Adapun hasil pengolahan dari data rasio kemandirian daerah, rasio tingkat kemandirian daerah, tingkata ketergantungan daerah, dan tingkatat elastisitas PAD. Masing- masing adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai pemerintah sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Pelaksanaan otonomi dikatakan berhasil dan tidaknya, maka Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. salah satunya bisa terlihat dari tingkat kemandirian suatu daerah yang diukur dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana perimbangan.¹ Adapun kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada table 4-2

Tabel 4-1
Kreteria Keuangan Kemandirian Daerah

Prosentasi PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Baik
10,01 - 20,00	Baik
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Kurang
>50	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdakgri-Fisipol UGM, 1991

Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Kecamatan Undaan dapat dilihat pada tabel 4-2

¹ Nyoman Trisna Erawati and Leny Suzan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung," *E-Proceeding of Management 2*, no. 3 (2015): 3259–3266.

Tabel 4-2
Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kecamatan Undaan
2019-2022

TABEL 4-2 RASIO TINGKAT KEMADIRIAN KEUANGAN KECAMATAN UNDAAN 2019-2022				
TA HU N	DESA	PAD (RP)	DANA PERIMBANGAN (RP 000)	RASIO KEMANDIRIA N %
2019	BERUGEN JANG	499.600 .000	1.788.256.300	27,94
2019	SAMBUNG	876.690 .000	1.961.214.167	44,70
2019	GLAGAH WARU	634.252 .124	2.071.642.993	30,62
2019	TERANGM AS	369.704 .000	1.705.083.887	21,68
2019	KALIREJO	369.965 .000	1.698.366.724	21,78
2019	LAMBANG AN	784.650 .000	1.994.498.220	39,34
2019	MEDINI	670.387 .250	2.532.186.582	26,47
2019	UNDAAN KIDUL	1.350.9 78.000	2.657.539.900	50,84
2019	UNDAAN TENGAH	1.375.8 00.000	2.504.046.500	54,94
2019	WONOSOC O	713.910 .000	1.910.033.012	37,38
2020	BERUGEN JANG	525.000 .000	1.999.088.660	26,26
2020	SAMBUNG	891.250 .000	1.829.579.276	48,71
2020	GLAGAH WARU	984.686 .000	1.882.103.070	52,32
2020	TERANGM AS	403.900 .000	1.841.766.458	21,93
2020	KALIREJO	866.725 .000	3.423.975.039	25,31
2020	LAMBANG AN	884.662 .000	1.973.282.199	44,83
2020	MEDINI	1.252.9	2.562.206.398	48,90

		50.000		
2020	UNDAAN KIDUL	1.236.375.000	2.976.625.979	41,54
2020	UNDAAN TENGAH	1.538.500.000	2.359.177.680	58,32
2020	WONOSOCO	689.720.000	1.845.249.505	37,38
2021	BERUGENJANG	493.000.000	2.328.452.151	21,17
2021	SAMBUNG	795.700.000	2.011.828.944	39,55
2021	GLAGAH WARU	1.014.620.877	2.147.526.823	47,25
2021	TERANGMAS	370.200.000	1.634.210.073	22,65
2021	KALIREJO	1.057.787.500	3.247.428.605	32,57
2021	LAMBANGAN	517.550.000	1.201.165.626	43,09
2021	MEDINI	915.200.000	2.589.635.420	35,34
2021	UNDAAN KIDUL	1.423.719.000	3.386.774.600	42,04
2021	UNDAAN TENGAH	983.300.000	3.596.810.200	27,34
2021	WONOSOCO	667.590.000	2.242.240.619	29,77
2022	BERUGENJANG	482.000.000	1.887.944.038	25,53
2022	SAMBUNG	894.100.000	1.832.959.513	48,78
2022	GLAGAH WARU	970.750.000	2.351.686.457	41,28
2022	TERANGMAS	484.000.000	1.612.153.969	30,02
2022	KALIREJO	923.325.000	3.215.685.914	28,71
2022	LAMBANGAN	468.400.000	2.104.457.160	22,26
2022	MEDINI	1.643.300.000	2.968.874.146	55,35

2022	UNDAAN KIDUL	1.451.5 82.000	2.426.211.100	59,83
2022	UNDAAN TENGAH	1.451.3 00.000	5.798.838.500	25,03
2022	WONOSOC O	622.550 .000	1.679.998.337	37,06
RATA-RATA				295,16

Sumber; data sekunder yang diolah

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada table 4-3 di atas dapat di atas diketahui bahwa pada periode tahun anggaran tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan prosentase yang berfluktuatif. Dari empat tahun perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di antara 10 desa tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang rendah yaitu di desa Terangmas sebesar 21,68% dan tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang tinggi yaitu di desa Undaan Tengah sebesar 54,94%. Pada tahun anggaran 2020 tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang rendah yaitu di desa Terangmas sebesar 21,93%, dan tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang tinggi yaitu di desa Undaan Tengah sebesar 58,32%. Kemudian tahun anggaran 2021 tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang rendah yaitu di desa Berugengjang sebesar 21,17%, dan tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu di desa Glagahwaru sebesar 47,25%. Selanjutnya tahun anggaran 2022 tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang paling rendah yaitu di desa Lambangan sebesar 22,26%, dan tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu di desa Undaan Kidul sebesar 59,83%.

Adapun rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kecamatan Undaan tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 295,16% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria pada table 4-3 maka Kecamatan Undaan masuk dalam kategori tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kurang artinya Kecamatan Undaan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintahan pusat atau provinsi melalui dana perimbangan, hal ini menunjukkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Sebab kurangnya menggali potensi daerah dengan maksimal.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemajuan suatu wilayah dapat tercermin dari kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintah. Pencapaian ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diukur melalui rasio antara dana perimbangan dan pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah pusat, yang mencerminkan tingkat ketergantungan daerah tersebut.²

Adapun kriteria penilaian ketergantungan daerah dapat dilihat pada table 4-3

Tabel 4-3

Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah

Prosentasi PAD terhadap Total penerimaan non subsidi	Ketergantungan keuangan daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50	Sangat tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdakgri-Fisipol UGM, 1999

Hasil perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 4-4

² Yulistiani Marlianita and Suji Abdullah Saleh, "Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat," *Indonesian Accounting Research Journal* 1, no. 1 (2020): 25–35, <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>.

Tabel 4-4
Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kecamatan
Undaan Tahun Anggaran 2019-2022

TABEL 4-4 RASIO TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN KECAMATAN UNDAAN 2019-2022				
TAHUN	DESA	DANA PERIMBANGAN (RP 000)	PENDAPATAN DAERAH (RP 000)	RASIO KETERGANTUNGAN %
2019	BERUGENJANG	1.788.256.300	2.287.856.300	78,16
2019	SAMBUNG	1.961.214.167	2.837.904.167	69,11
2019	GLAGAHWARU	2.071.642.993	2.705.895.117	76,56
2019	TERANGMAS	1.705.083.887	2.074.787.887	82,18
2019	KALIREJO	1.698.366.724	2.068.331.724	82,11
2019	LAMBANGAN	1.994.498.220	2.779.148.220	71,77
2019	MEDINI	2.532.186.582	3.202.573.832	79,07
2019	UNDAAN KIDUL	2.657.539.900	4.008.517.900	66,30
2019	UNDAAN TENGAH	2.504.046.500	3.877.846.500	64,57
2019	WONOSOCO	1.910.033.012	2.623.943.012	72,79
2020	BERUGENJANG	1.999.088.660	2.524.088.660	79,20
2020	SAMBUNG	1.829.579.276	2.720.829.276	67,24
2020	GLAGAHWARU	1.882.103.070	2.863.789.070	65,72
2020	TERANGMAS	1.841.766.458	2.245.666.458	82,01
2020	KALIREJO	3.423.975.039	4.290.700.039	79,80
2020	LAMBANGAN	1.973.282.199	2.857.944.199	69,05
2020	MEDINI	2.562.206.398	3.815.156.398	67,16
2020	UNDAAN KIDUL	2.976.625.979	4.213.000.979	70,65
2020	UNDAAN TENGAH	2.359.177.680	7.250.138.500	32,54
2020	WONOSOCO	1.845.249.505	2.534.969.505	72,79
2021	BERUGENJANG	2.328.452.151	2.821.452.151	82,53
2021	SAMBUNG	2.011.828.944	2.807.528.944	71,66
2021	GLAGAHWARU	2.147.526.823	3.162.147.700	67,91
2021	TERANGMAS	1.634.210.073	2.004.410.073	81,53
2021	KALIREJO	3.247.428.605	4.305.216.105	75,43
2021	LAMBANGAN	1.201.165.626	1.718.715.626	69,89
2021	MEDINI	2.589.635.420	3.504.835.420	73,89
2021	UNDAAN KIDUL	3.386.774.600	4.810.493.600	70,40
2021	UNDAAN TENGAH	3.596.810.200	4.580.110.200	78,53

2021	WONOSOCO	2.242.240.619	2.909.830.619	77,06
2022	BERUGENJANG	1.887.944.038	2.369.944.038	79,66
2022	SAMBUNG	1.832.959.513	2.727.059.513	67,21
2022	GLAGAHWARU	2.351.686.457	3.322.436.357	70,78
2022	TERANGMAS	1.612.153.969	2.096.153.969	76,91
2022	KALIREJO	3.215.685.914	4.139.010.914	77,69
2022	LAMBANGAN	2.104.457.160	2.572.857.160	81,79
2022	MEDINI	2.968.874.146	4.612.174.146	64,37
2022	UNDAAN KIDUL	2.426.211.100	3.877.793.100	62,57
2022	UNDAAN TENGAH	5.798.838.500	7.250.138.500	79,98
2022	WONOSOCO	1.679.998.337	2.302.548.337	72,96
RATA-RATA				582,31

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tingkat ketergantunganm keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan pada table 4-5 menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif. Tingkat ketergantungan keuangan daerah kecamatan Undaan pada tahun 2019 menunjukkan prosentase tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah yang rendah yaitu di desa Undaan Tengah sebesar 64,57%, dan tingkat rasio ketergantungan menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu di desa Terangmas sebesar 82,18%. Pada tahun anggaran 2020 menunjukkan prosentase tingkat rasio ketergantungan daerah paling rendah yaitu di desa Undaan Tengah 32,54%, dan tingkat rasio ketergantungan menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu di desa Terangmas sebesar 82,01%. Kemudian tahun anggaran 2021 menunjukkan prosentase tingkat rasio ketergantungan daerah paling rendah yaitu di desa Glagahwaru sebesar 67,91%, dan tingkat rasio ketergantungan menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu di desa Berugenjang sebesar 82,53%. Selanjutnya tahun anggaran 2022 menunjukkan prosentase tingkat rasio ketergantungan daerah paling rendah yaitu di desa Undaan Kidul sebesar 62,57%, dan tingkat rasio ketergantungan menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu di desa Lambangan sebesar 81,79%.

Adapun rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah kecamatan Undaan tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan prosentase sebesar 582,31%. Sehingga diklasifikasikan dalam kategori tingkat ketergantungan keuangan

yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, karna kurangnya menggali potensi yang ada di desa, sehingga daerah masih sangat bergantung terhadap pemerintahan pusat atau kabupaten kota melalui dana perimbangan.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan lokal. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan Daerah. Keberhasilan implementasi tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam menjalankan pembangunan dapat dilihat dari rasio antara PAD dan pendapatan daerah secara keseluruhan.³ Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel 4-6

Tabel 4-5

Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentasi PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Hasil perhitungan tingkat desentralisasi fiskal kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 dapat dilihat di tabel 4-6.

³ Zuhri, "Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal."

Table 4-6
Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Kecamatan Undaan
2019-2022

TABEL 4-7 RASIO TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL KECAMATAN UNDAAN 2019-2022				
TAHUN	DESA	PAD (RP 000)	PENDAPATAN DAERAH (RP 000)	RASIO DESENTRALISASI FISKAL %
2019	BERUGENJANG	499.600.000	2.287.856.300	21,84
2019	SAMBUNG	876.690.000	2.837.904.167	30,89
2019	GLAGAHWARU	634.252.124	2.705.895.117	23,44
2019	TERANGMAS	369.704.000	2.074.787.887	17,82
2019	KALIREJO	369.965.000	2.068.331.724	17,89
2019	LAMBANGAN	784.650.000	2.779.148.220	28,23
2019	MEDINI	670.387.250	3.202.573.832	20,93
2019	UNDAAN KIDUL	1.350.978.000	4.008.517.900	33,70
2019	UNDAAN TENGAH	1.375.800.000	3.877.846.500	35,48
2019	WONOSOCO	713.910.000	2.623.943.012	27,21
2020	BERUGENJANG	525.000.000	2.524.088.660	20,80
2020	SAMBUNG	891.250.000	2.720.829.276	32,76
2020	GLAGAHWARU	984.686.000	2.863.789.070	34,38
2020	TERANGMAS	403.900.000	2.245.666.458	17,99
2020	KALIREJO	866.725.000	4.290.700.039	20,20
2020	LAMBANGAN	884.662.000	2.857.944.199	30,95
2020	MEDINI	1.252.950.000	3.815.156.398	32,84
2020	UNDAAN KIDUL	1.236.375.000	4.213.000.979	29,35
2020	UNDAAN TENGAH	1.451.300.000	7.250.138.500	20,02
2020	WONOSOCO	689.720.000	2.534.969.505	27,21
2021	BERUGENJANG	493.000.000	2.821.452.151	17,47

2021	SAMBUNG	795.700. 000	2.807.528.944	28,34
2021	GLAGAHW ARU	1.014.62 0.877	3.162.147.700	32,09
2021	TERANGM AS	370.200. 000	2.004.410.073	18,47
2021	KALIREJO	1.057.78 7.500	4.305.216.105	24,57
2021	LAMBANG AN	517.550. 000	1.718.715.626	30,11
2021	MEDINI	915.200. 000	3.504.835.420	26,11
2021	UNDAAN KIDUL	1.423.71 9.000	4.810.493.600	29,60
2021	UNDAAN TENGAH	983.300. 000	4.580.110.200	21,47
2021	WONOSOC O	667.590. 000	2.909.830.619	22,94
2022	BERUGENJ ANG	482.000. 000	2.369.944.038	20,34
2022	SAMBUNG	894.100. 000	2.727.059.513	32,79
2022	GLAGAHW ARU	970.750. 000	3.322.436.357	29,22
2022	TERANGM AS	484.000. 000	2.096.153.969	23,09
2022	KALIREJO	923.325. 000	4.139.010.914	22,31
2022	LAMBANG AN	468.400. 000	2.572.857.160	18,21
2022	MEDINI	1.643.30 0.000	4.612.174.146	35,63
2022	UNDAAN KIDUL	1.451.58 2.000	3.877.793.100	37,43
2022	UNDAAN TENGAH	1.451.30 0.000	7.250.138.500	20,02
2022	WONOSOC O	622.550. 000	2.302.548.337	27,04
RATA-RATA				208,23

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4-7 di atas dapat diketahui bahwa perhitungan rasio desentralisasi fiskal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan persentase yang meningkat setiap tahunnya. Dari empat tahun perhitungan rasio desentralisasi fiskal pada tahun 2020 adalah rasio dengan tingkat yang rendah yaitu di desa Terangmas sebesar 17,82%, dan persentase rasio derajat desentralisasi fiskal yang paling tinggi yaitu di desa Undaan Tengah sebesar 35,48%. Pada tahun 2021 menunjukkan persentase rasio

derajat desentralisasi fiskal yang paling rendah yaitu di desa Undaan Tengah sebesar Terangmas sebesar 17,99%, dan presentase rasio derajat desentralisasi fiskal yang paling tinggi yaitu di desa Glagahwaru sebesar 34,38%. Kemudian pada tahun 2021 menunjukkan presentase rasio desentralisasi fiskal yang paling rendah yaitu di desa Berugenjang 17,47%, dan presentase rasio desentralisasi fiskal yang paling tinggi yaitu di desa Glagahwaru sebesar 32,09%. Selanjutnya pada tahun 2022 menunjukkan presentase rasio desentralisasi fiskal yang paling rendah yaitu di desa Lambangan sebesar 18,21%, dan presentase rasio desentralisasi fiskal yang paling tinggi yaitu di desa Undaan Kidul 37,43%.

Berdasarkan perhitungan dari tahun 2019 hingga 2022, terdapat rata-rata pertumbuhan sebesar 208,23% di Kecamatan Undaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Undaan memiliki kinerja yang sangat baik. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah dan kemampuan finansial daerah untuk mendukung pembangunan mencapai 50%. Peningkatan PAD terjadi karena Pendapatan Asli Daerah, terutama dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya, mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan Total Penerimaan Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kecamatan Undaan berhasil melaksanakan prinsip-prinsip desentralisasi dengan baik.

4. Rasio efektifitas pendapatan daerah

Tingkat efektivitas suatu daerah dapat dinilai dari sejauh mana mereka mencapai tujuan realisasi pendapatan dan target yang ditetapkan selama suatu periode pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung rasio antara pendapatan daerah yang berhasil diperoleh dengan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penilaian tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4-8

Tabel 4-7

Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentasi Kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun
1996

Hasil perhitungan tingkat efektifitas keuangan daerah kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 4-8

Tabel 4-8
Rasio Tingkat Efektifitas APBD Daerah Kecamatan Undaan
2019-2022

TABEL 4-8 RASIO TINGKAT EFEKTIFITAS APBD DESA BERUGENJANG 2019-2022				
TAHUN	DESA	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (RP 000)	TOTAL BELANJA (RP 000)	RASIO EFEKTIVITAS %
2019	BERUGENJANG	2.287.856.300	2.667.245.657	85,78
2019	SAMBUNG	2.837.904.167	2.359.388.661	120,28
2019	GLAGAH WARU	2.705.895.117	2.570.281.440	105,28
2019	TERANGMAS	2.074.787.887	2.004.776.817	103,49
2019	KALIREJO	2.068.331.724	1.225.912.125	168,72
2019	LAMBANGAN	2.779.148.220	2.898.059.433	95,90
2019	MEDINI	3.202.573.832	3.264.710.038	98,10
2019	UNDAAN KIDUL	4.008.517.900	4.150.311.700	96,58
2019	UNDAAN TENGAH	3.877.846.500	4.481.383.819	86,53
2019	WONOSO CO	2.623.943.012	3.341.535.673	78,53
2020	BERUGENJANG	2.524.088.660	2.831.456.473	89,14
2020	SAMBUNG	2.720.829.276	2.801.305.473	97,13
2020	GLAGAH WARU	2.863.789.070	2.826.528.320	101,32
2020	TERANGMAS	2.245.666.458	2.341.984.685	95,89
2020	KALIREJO	4.290.700.039	4.433.752.294	96,77
2020	LAMBANGAN	2.857.944.199	2.732.580.705	104,59
2020	MEDINI	3.815.156.398	4.044.961.781	94,32
2020	UNDAAN KIDUL	4.213.000.979	4.274.752.819	98,56

2020	UNDAAN TENGAH	3.897.677.680	4.489.901.662	86,81
2020	WONOSO CO	2.534.969.505	2.571.309.901	98,59
2021	BERUGEN JANG	2.821.452.151	3.132.568.705	90,07
2021	SAMBUNG	2.807.528.944	3.262.826.276	86,05
2021	GLAGAH WARU	3.162.147.700	2.544.879.439	124,26
2021	TERANGM AS	2.004.410.073	1.981.799.900	101,14
2021	KALIREJO	4.305.216.105	4.355.845.901	98,84
2021	LAMBAN GAN	1.718.715.626	1.191.871.704	144,20
2021	MEDINI	3.504.835.420	3.457.263.668	101,38
2021	UNDAAN KIDUL	4.810.493.600	5.084.239.894	94,62
2021	UNDAAN TENGAH	4.580.110.200	4.882.895.670	93,80
2021	WONOSO CO	2.909.830.619	2.846.656.863	102,22
2022	BERUGEN JANG	2.369.944.038	2.671.126.545	88,72
2022	SAMBUNG	2.727.059.513	2.667.768.415	102,22
2022	GLAGAH WARU	3.322.436.357	3.406.455.600	97,53
2022	TERANGM AS	2.096.153.969	2.144.190.700	97,76
2022	KALIREJO	4.139.010.914	3.960.480.796	104,51
2022	LAMBAN GAN	2.572.857.160	2.152.344.841	119,54
2022	MEDINI	4.612.174.146	3.889.997.051	118,56
2022	UNDAAN KIDUL	3.877.793.100	4.386.988.461	88,39
2022	UNDAAN TENGAH	7.250.138.500	7.600.806.029	95,39
2022	WONOSO CO	2.302.548.337	2.342.857.312	98,28
RATA-RATA				809,95

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4-9 di atas menunjukkan bahwa rasio efektifitas kecamatan undaan dalam kurun tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 adalah menunjukkan presentase rasio efektifitas yang rendah yaitu di desa Wonosoco sebesar 78,53%, dan presentase rasio efektifitas yang tinggi yaitu di desa Kalirejo sebesar 168,72%. Pada tahun 2020 menunjukkan

presentase rasio efektifitas yang rendah yaitu di desa Undaan Tengah sebesar 86,81%, dan presentase rasio efektifitas yang paling tinggi yaitu di desa Lambangan sebesar 104,59%. Kemudian pada tahun 2021 menunjukkan presentase rasio efektifitas yang rendah yaitu di desa Sambung sebesar 86,05%, dan presentase rasio efektifitas yang paling tinggi yaitu di desa Lambangan sebesar 144,20%. Selanjutnya pada tahun 2022 menunjukkan presentase rasio efektifitas yang rendah yaitu di desa Undaan Kidul sebesar 88,39%, dan presentase rasio efektifitas yang paling tinggi yaitu di desa Lambangan 119,54%

Adapun rata-rata tingkat efektifitas Kecamatan Undaan tahun anggaran 2019 sampai dengan 2014 sebesar 809,95% masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menandakan bahwa Kecamatan Undaan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, terlihat dari kemampuan mereka dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka yang lebih tinggi. Kesuksesan ini tercermin dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan harapan. Dengan demikian, pemerintah Kecamatan Undaan telah berhasil mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah mereka dan mampu membiayai kegiatan sendiri tanpa tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

5. Pemetaan Keuangan Dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Metode Kuadrat.

Kemampuan keuangan daerah diukur dengan menghitung rata-rata dari indeks share, growth, dan elastisitas. Dengan melakukan perhitungan ini, kita dapat memahami gambaran keseluruhan tentang kondisi keuangan di Kecamatan Undaan. Setelah menilai kondisi keuangan daerah di Undaan melalui indeks share, growth, dan elastisitas, kita dapat menentukan posisi keuangan kecamatan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Berikut adalah hasil pengolahan dari indeks share, growth, dan elastisitas:

a. Growth

Growth merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari satu periode ke periode berikutnya. Hasil pengukuran indeks growth dapat ditemukan dalam Tabel 4-9

Tabel 4-9 Indeks Growt

INDEKS GROWT				
TAHUN	GROWT	KONDISI MAX	KONDISI MIN	INDEKS
2019	100.00	14,174,904.00	(58,671.00)	0.41
2019	23,249.00	14,174,904.00	(58,671.00)	0.58
2019	(26,161.00)	14,174,904.00	(58,671.00)	0.23
2019	(13,975.00)	14,174,904.00	(58,671.00)	0.31
2019	14,174,904.00	14,174,904.00	(58,671.00)	100.00
2019	18,922.00	14,174,904.00	(58,671.00)	0.55
2019	(58,671.00)	14,174,904.00	(58,671.00)	-
2019	19,850.00	14,174,904.00	(58,671.00)	0.55
2019	554,266.00	14,174,904.00	(58,671.00)	4.31
2019	(10,786.00)	14,174,904.00	(58,671.00)	0.34
				107.27
2020	100.00	493,205.00	(745,928.00)	60.21
2020	24,334.00	493,205.00	(745,928.00)	62.16
2020	105,386.00	493,205.00	(745,928.00)	68.70
2020	(6,954.00)	493,205.00	(745,928.00)	59.64
2020	18,727.00	493,205.00	(745,928.00)	61.71
2020	493,205.00	493,205.00	(745,928.00)	100.00
2020	34,021.00	493,205.00	(745,928.00)	62.94
2020	(745,928.00)	493,205.00	(745,928.00)	-
2020	67,526.00	493,205.00	(745,928.00)	65.65
2020	(9,056.00)	493,205.00	(745,928.00)	59.47
				600.47
2021	100.00	46,346.00	(22,326.00)	32.66
2021	26,287.00	46,346.00	(22,326.00)	70.79
2021	46,346.00	46,346.00	(22,326.00)	100.00
2021	(5,745.00)	46,346.00	(22,326.00)	24.15
2021	15,384.00	46,346.00	(22,326.00)	54.91
2021	(9,580.00)	46,346.00	(22,326.00)	18.56
2021	23,015.00	46,346.00	(22,326.00)	66.03
2021	27,997.00	46,346.00	(22,326.00)	73.28
2021	(22,326.00)	46,346.00	(22,326.00)	-
2021	(21,146.00)	46,346.00	(22,326.00)	1.72

				442.09
2022	100.00	126,647.00	(51,464,539.00)	99.75
2022	21,696.00	126,647.00	(51,464,539.00)	99.80
2022	126,647.00	126,647.00	(51,464,539.00)	100.00
2022	(9,944.00)	126,647.00	(51,464,539.00)	99.74
2022	21,017.00	126,647.00	(51,464,539.00)	99.80
2022	(10,296.00)	126,647.00	(51,464,539.00)	99.73
2022	13,987.00	126,647.00	(51,464,539.00)	99.78
2022	(75,714.00)	126,647.00	(51,464,539.00)	99.61
2022	(51,464,539.00)	126,647.00	(51,464,539.00)	-
2022	(7,512.00)	126,647.00	(51,464,539.00)	99.74
				897.95
JUMLAH				819.1110128
RATA-RATA				163.8222026

b. Share

Indeks *share* adalah metrik yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan rutin dan proyek pembangunan lokal.. Adapun hasil pengukuran indeks *share* dapat dilihat pada tabel 4-10

Tabel 4-10 Indeks Share

INDEKS SHARE				
TAHUN	SHARE	KONDISI MAX	KONDISI MIN	INDEKS
2019	261.4103974	273.4091326	261.4103974	0
2020	273.4091326	273.4091326	261.4103974	100
2021	264.4451915	273.4091326	261.4103974	25.29261668
2022	268.7043525	273.4091326	261.4103974	60.78936637
JUMLAH				186.081983
RATA-RATA				37.21639661

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dengan melihat hasil perhitungan pada table 4-10 Kecamatan Undaan menunjukkan rata-rata sebesar 37.21639661

c. Indeks Elastisitas

Elastisitas merupakan parameter yang menggambarkan seberapa responsif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

pertumbuhan ekonomi. Nilai elastisitas yang mencerminkan hubungan antara pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Undaan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah. Hasil rata-rata indeks elastisitas dapat ditemukan dalam Tabel 4-12 setelah melakukan perhitungan indeks tersebut

Tabel 4-11 Indeks Elastisitas

Indeks Elastisitas				
Tahun	Elastisitas	Kondisi Max Elastisitas %	Kondisi Min Elastisitas %	Indeks
2019	0,030863	0,032087	(0,021854)	97,7315956
2020	0,032087	0,032087	(0,021854)	100,000000
2021	0,015636	0,032087	(0,021854)	69,5018631
2022	(0,021854)	0,032087	(0,021854)	0,0000000
Jumlah				267,233458
Rata-Rata				53,4466918

Sumber: data sekunder yang diolah

Dengan hasil perhitungan pada tabel 4-11 menunjukkan rata-rata indeks elastisitas sebesar 53,4466918

Adapun dari hasil pengukuran indeks Growt, Share, dan Elastisitas, maka diperoleh rata-rata indeks kemampuan keuangan daerah kecamatan Undaan. Adapun kriteria penilaian tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4-12

Tabel 4-12

Kreteria Tingkat Kemampuan Keuangn Daerah

Indeks Kemampuan Keuang Darah	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0,34-0,43	Sedang
0,41-1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

Hasil perhitungan Indeks Kempampuan Keuangan daerah Kecamatan Undaan Tahun Anggaran 2019-2022 dapat dilihat dari table 4-13

Tabel 4-13

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2022

INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019-2022			
INDEKS GROWT %	INDEKS SHARE %	INDEKS ELASTISITAS %	IKK %
163.8222026	37.21639661	53.4466918	84.82843034

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dalam hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kecamatan Undaan selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2022, skor indeksinya adalah 84.82843034. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kecamatan Undaan berada pada tingkat yang tinggi. Namun, peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah di Undaan sebagian besar disebabkan oleh bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah pusat. Analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa Kecamatan Undaan memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang menekankan pada kemandirian dan kewenangan penuh pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Peta Kemampuan Keuangan berdasarkan metode kuadrat, terbagi menjadi empat kuarat dengan kondisi masing-masing tercantum dalam table 4-14

Tabel 4-14

Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadrat

		Rata-rata GROWTH (%)	
Rata-rata share (%)	KUADRAN II	KUADRAN I	
	Share : Rendah	Share : Tinggi	
	Growth: Tinggi	Growth : Tinggi	
	KUADRAN IV	KUADRAN III	
	Share : Rendah	Share : Tinggi	
	Growth: Rendah	Growth : Rendah	

Sumber: Bapenas 2003

Dengan menggunakan metode kuadrat pada peta kemampuan keuangan daerah, kita dapat mengelompokkan status kemampuan keuangan berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu, sebagaimana terlihat dalam Tabel 4-15

Tabel 4-15
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan

KUADRAT	KONDISI
I	Situasi yang paling diinginkan adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi signifikan dalam total belanja, sementara daerah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi lokal. Hal ini tercermin dalam nilai share dan growth yang tinggi.
II	Meskipun belum mencapai kondisi yang ideal, daerah memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya lokal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peluang untuk berperan signifikan dalam Total Belanja. Meskipun kontribusi PAD terhadap Total Belanja masih rendah, pertumbuhan PAD tetap tinggi.
III	Situasi ini masih belum mencapai standar ideal. Meskipun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja tinggi, peluang untuk PAD memiliki peran yang signifikan terbatas karena pertumbuhannya yang lambat. Meskipun kontribusi PAD terhadap Total Belanja tinggi, pertumbuhan PAD tetap rendah.
IV	Kondisi ini adalah yang paling tidak menguntungkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memiliki kontribusi signifikan dalam Total Belanja, dan daerah belum mampu mengoptimalkan potensi lokalnya. Kontribusi PAD terhadap Total Belanja serta pertumbuhan PAD keduanya rendah.

Sumber: Bapenas 2003

Berdasarkan hasil perhitungan share dan growth terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kecamatan Undaan dari tahun anggaran 2019 hingga 2022, data menunjukkan nilai share sebesar 37.21639661% dan growth sebesar 163.8222026%. Setelah melakukan pemetaan kemampuan keuangan daerah menggunakan metode kuadrat, posisi Kecamatan Undaan terletak pada kuadrat II. Meskipun belum mencapai kondisi ideal, daerah ini memiliki potensi pengembangan lokal yang dapat dimaksimalkan. Hal ini memberi peluang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memiliki peran yang signifikan dalam total belanja daerah. Meskipun kontribusi PAD terhadap total belanja masih rendah, pertumbuhan PAD-nya cukup tinggi. Dengan demikian, pemerintah daerah Kecamatan Undaan masih memiliki kesempatan untuk lebih efektif menggali potensi lokal, yang pada gilirannya

dapat meningkatkan PAD dan berkontribusi lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undaan merupakan tujuan wisata yang sangat diminati oleh masyarakat, dengan atraksi seperti Sungai Sendang, jalur pendakian, dan kolam renang alami yang menyediakan layanan parkir. Jika potensi wisata lokal ini dikelola dengan baik, pemerintah Kecamatan Undaan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada periode mendatang. Kecamatan Undaan juga dikenal sebagai desa wisata, dan hal ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi dari layanan dan jasa yang ditawarkan di wilayah tersebut. Pajak dan retribusi merupakan penyumbang utama dalam peningkatan PAD, dan hal ini seharusnya dimanfaatkan dengan optimal oleh pemerintahan setempat.

